



**Laporan Bulanan Sekretariat Utama
Bulan Juni
2025**

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu penting karena bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga pemerintah mengimplementasikan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi SAKIP ini digunakan untuk mengobservasi dan menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Badan Pangan Nasional menggunakan aplikasi SAKIP sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang dipergunakan. Sekretariat Utama yang bertugas mendukung manajemen Badan Pangan Nasional wajib mengisi aplikasi SAKIP. Pengisian aplikasi SAKIP ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan aktualisasi program atau kegiatan di Sekretariat Utama di sepanjang tahun 2025. Tahap berikutnya menyusun Laporan Bulanan Sekretariat Utama yang berisi aktualisasi dari aktivitas, program dan kegiatan yang terjadi di Badan Pangan Nasional. Laporan ini disusun secara bulanan sehingga pelaporan kegiatan atau program yang sudah berlangsung di bulan itu. Selain itu, bahan dan data yang dipakai pada aplikasi SAKIP ini menggunakan instrumen penilaian yang berpatokan dengan implementasi dan realisasi kegiatan atau program yang dilaksanakan. Hasil dari dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk laporan bulan berikutnya. Sekretariat utama mendapatkan alokasi berdasarkan aturan alokasi dalam BA 125 milik Badan Pangan Nasional dan uraian alokasi untuk Program Dukungan Manajemen serta diprioritaskan untuk pembayaran honor dan operasional kantor. Pemantauan atas penggunaan alokasi yang aturan dalam bulan Juni tahun 2025 harus tetap terlaksana agar efisien dan efektif. Kami berharap laporan ini bisa berguna untuk seluruh pihak dan sebagai referensi buat pemugaran aplikasi aktivitas kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan pada rangka menyajikan laporan.

Jakarta, Juli 2025



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I: Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi Penyusunan Laporan	4
BAB II: Rencana Kerja Output	5
BAB III: Pelaksanaan Kegiatan	8
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	9
4.1 Kesimpulan	27
4.3 Rekomendasi	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Juni 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-7 Tanggal 18 Juni 2025	6
Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Juni Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama	9
Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Juni Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 7 – 18 Juni 2025	28
Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan 2025.....	29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk masyarakat. Hal ini tergambar dari Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipercaya masyarakat perlu mengatur akan kebijakan terhadap pangan. Pemerintah mengatur tentang kebijakan pangan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dijelaskan tentang tugas, susunan badan, dan tata kelola dari Badan Pangan Nasional.

Fungsi yang diutamakan untuk Badan Pangan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, Badan Pangan Nasional berfokus untuk mengatur kebijakan di bidang pangan. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan BUMN di bidang pangan dalam mengerjakan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah, Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sistem pangan nasional yang transparan, akuntabel, loyal dan berkelanjutan serta berkoordinasi dengan instansi-instansi lain baik itu kementerian-kementerian lain maupun universitas-universitas untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana visi Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022.

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1 Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 2 Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi;
- 3 Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- 4 Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Sekretariat Utama

Laporan bulanan dibuat Badan Pangan Nasional secara periodik sebagai bentuk implementasi instansi negara yang bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pemantauan, jejak program atau kegiatan yang telah terlaksana dan evaluasi yang menggambarkan pencapaian dan bentuk realisasi terhadap target kinerja organisasi dalam periode bulanan. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan pencapaian target dapat berjalan sesuai yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul di periode mendatang.

Hasil atas peninjauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan pendayagunaan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Juni 2025 dituangkan

dalam bentuk laporan peninjauan dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Utama bulan Juni 2025. Laporan ini sebagai catatan dokumentasi realisasi fisik dan keuangan selama bulan Juni 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Sekretariat Utama tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan dan merepresentasikan program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat Utama di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Utama pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Sekretariat Utama periode bulan Juni 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target periode bulan Juni 2025.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

Metodologi penyusunan laporan meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II
RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja pada Sekretariat Utama selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Juni 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian Rincian Output (RO) dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-7 pada bulan Juni 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Juni ditargetkan sebesar 10,11% Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Juni 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-6

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Alokasi Tahun 2025		Target Juni th. 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 10,11% (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen		112,459,882,000		11,368,750,960	-
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional					
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	824,972,000		83.404.669	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	325,011,000		32.858.612	
	Layanan Hukum	686,492,000		69.404.341	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,373,720,000		239.983.092	
	Layanan Protokoler	580,600,000		58.698.660	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000		108.203.387	
	Layanan Umum	7,844,720,000		793.101.192	
	Layanan Perkantoran	81,429,806,000		8.232.553.387	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1,314,054,000		132.850.859	

.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1,887,686,000		190.845.055	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000		538.830.850	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000		78.039.494	
	Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000		110.608.051	
	Layanan Audit Internal	3,201,594,000		323.681.153	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000		27.375.353	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000		326.811.816	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221,999,000		22.444.099	

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 53 output/RO dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 2,690,897,892,000,-** untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Juni Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Juni Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama

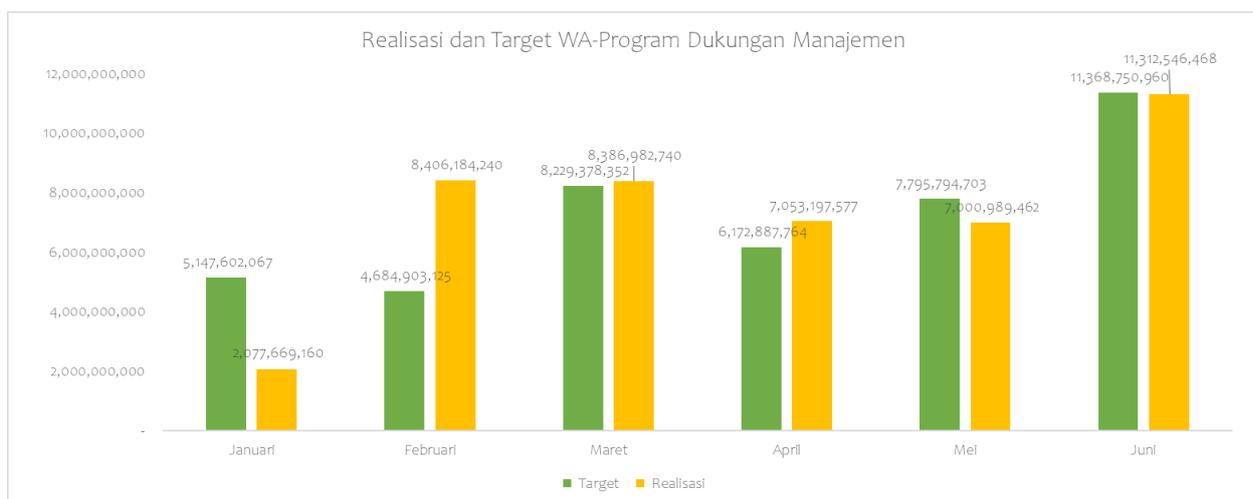
Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Target (10,11%)		Realisasi (Periode Juni)	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen					
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional		11,368,750,960		11,312,546,468	-
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	83.404.669		210,813,284	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	32.858.612		73,003,335	
	Layanan Hukum	69.404.341		12,978,500	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	239.983.092		178,560,223	
	Layanan Protokoler	58.698.660		64,606,671	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	108.203.387		22,116,500	
	Layanan Umum	793.101.192		714,513,512	

	Layanan Perkantoran	8.232.553.387		9,160,416,716	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	132.850.859		51,750,000	
.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	190.845.055		89,202,520	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	538.830.850		141,695,104	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	78.039.494		33,397,123	
	Layanan Manajemen Keuangan	110.608.051		43,946,544	
	Layanan Audit Internal	323.681.153		120,769,965	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	27.375.353		23,527,500	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	326.811.816		371,248,971	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	22.444.099		0	

Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Juni Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target 10,11% (Rp)	Realisasi Juni (Rp)	% (Dari Target)
Badan Pangan Nasional	272.124.560.321	725,476,243,114	266,67%
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	260.676.339.911	714,163,696,646	274%
WA-Program Dukungan Manajemen	11,368,750,960	11,312,546,468	99,50%

Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Bulan Juni Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 11,312,546,468 (99,50%) dari target sebesar Rp. 7.795.794.703 (10,11%). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka target, realisasi dan PAGU WA-Program Dukungan Manajemen akan terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Juni Tahun 2025 telah ter-realisis anggaran sebesar **Rp.11,312,546,468,-** dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Sekretaris Utama

Sekretaris Utama

4 Juni 2025 - Stimulus Ekonomi Melalui Bantuan Pangan Beras, NFA: Instrumen Stabilitas dan Pengendalian Inflasi Pangan



Jakarta – Pemerintah terus memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang tengah dipercepat adalah penyaluran stimulus ekonomi melalui program bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP).

“Bantuan pangan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah dinamika harga pangan. Targetnya 18,3 juta KPM, masing-masing akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan,” jelas Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (4/6/2025).

"Ini juga menjadi perhatian khusus Kepala NFA, jangan sampai karena ada bantuan pangan, harga di tingkat petani justru turun. Saya di ingatkan bapak Kabadan ini harus jalan beriringan, masyarakat terbantu, petani juga tetap semangat tanam," katanya.

Sebelumnya dalam keterangan terpisah, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memastikan penyaluran bantuan pangan beras tidak akan menjadi faktor depresiasi harga gabah di tingkat petani. Ini karena tujuan stimulus ekonomi ini untuk menyokong masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami pun dengan Pak Mentan sudah bersepakat, agar menjaga harga gabah petani tidak sampai jatuh. Namun masyarakat yang layak dibantu juga tetap dapat bantuan. Itu kerennya hari ini, bisa sama-sama memahami 2 tujuan hulu dan hilir untuk tercapai semuanya," urai dia.

Sekjen Kemendagri, Tomsis Tohir juga mengingatkan bahwa meskipun stok beras cukup, harga beras di beberapa daerah masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mendorong NFA agar penyaluran beras SPHP dapat di akselerasi guna menurunkan harga di pasar.

"Tadi saya melihat pantauan panel harga NFA, harga beras naik di tingkat grosir dan eceran. Peningkatan harga ini terjadi di tengah cadangan beras pemerintah (CBP) terbilang cukup. Nah supaya tidak terlalu lama naiknya, saran saya SPHP segera di gelontorkan untuk menekan harga," ujar Tomsis.

Selain bantuan pangan beras, Sarwo mengatakan, NFA juga terus mengakselerasi pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hingga 23 Mei 2025, penyaluran beras SPHP telah mencapai 181.173 ton atau 60,39 persen dari target. "SPHP ini sempat kita jeda sementara saat panen raya agar petani bisa menikmati harga yang baik. Tapi akan segera berjalan lagi terutama wilayah yang harga beras medium sudah lebih dari 5% diatas HET," jelasnya.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Sarwo memaparkan beberapa komoditas yang perlu perhatian khusus. Di tingkat produsen, misalnya, harga ayam ras pedaging (livebird), kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) masih di bawah HAP. Di sisi lain, beberapa komoditas konsumen seperti bawang putih dan daging kerbau beku impor mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi.

11 Juni 2025 - Badan Pangan Nasional Dorong Penguatan Ketahanan Pangan di Wilayah 3T



Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, dengan Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache, yang berlangsung di Kantor NFA, Jakarta, Rabu (11/06).

Sarwo Edhy menyampaikan bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan pangan lokal, khususnya melalui pemanfaatan lahan desa secara profesional.

“Saya mendengar Bapak Wakil Bupati menyampaikan rencana optimalisasi lahan untuk penanaman jagung. Itu langkah yang sangat baik dan tentu kami dukung sepenuhnya. Swasembada pangan, baik untuk padi maupun jagung, merupakan strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Sarwo.

Lebih lanjut, Sarwo menjelaskan bahwa pada tahun ini NFA berkomitmen mengembangkan program Desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan memperluas cakupan Rumah Pangan B2SA hingga 809 lokasi di 50 kabupaten/kota. Ini merupakan bagian dari strategi dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

“Kami akan upayakan agar program Desa B2SA juga bisa dialokasikan di wilayah Bapak pada tahun 2026. Oleh karena itu, Bapak dapat mulai mempersiapkan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pangan,” tambahnya.

Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache, menyampaikan bahwa Kabupaten Nias Selatan merupakan wilayah tertinggal yang masih menghadapi banyak tantangan dalam ketahanan pangan. Dengan ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah

untuk komoditas seperti cabai dan padi, serta infrastruktur dan transportasi yang terbatas, dibutuhkan intervensi nyata dari pemerintah pusat. "Kami sangat berharap adanya perhatian khusus dari Badan Pangan Nasional dalam bentuk program konkret dan bantuan sarana pascapanen," ujarnya.

Di akhir pertemuan, Sarwo menyampaikan bahwa untuk bulan Juni–Juli 2025, Badan Pangan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk program bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kg per keluarga. Beliau menitikpkan agar program ini dapat diawasi dengan baik oleh pemerintah daerah agar tepat sasaran.

"Kami juga membuka peluang kerja sama lanjutan, terutama dalam program diversifikasi pangan dan peningkatan konsumsi protein, demi membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Nias Selatan," tegasnya.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Pejabat Perencana Ahli Madya NFA, antara lain Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pangan, serta Kasubbid Pariwisata, Ketenagakerjaan, dan Penanaman Modal Bapperida.

13 Juni 2025 - Badan Pangan Nasional Tegaskan Perlindungan Tumbuhan dan Hewan sebagai Pilar Swasembada Pangan



Yogyakarta — Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan bahwa perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan bukan sekadar isu teknis sektor pertanian, melainkan fondasi penting dalam menjaga kesinambungan produksi pangan nasional. Dalam konteks ini, penguatan sistem perlindungan

hayati menjadi bagian tak terpisahkan dari mandat Badan Pangan Nasional dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, saat membuka Pertemuan Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI) Tahun 2025 di Yogyakarta pada Jumat (13/6/25).

Dengan mengangkat tema “Perlindungan Tanaman Bersinergi Mendukung Tercapainya Swasembada Pangan Berkelanjutan”, pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi multipihak dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional.

“Badan Pangan Nasional memiliki tanggung jawab memastikan sistem pangan nasional berjalan dari hulu ke hilir secara tangguh dan berkelanjutan. Salah satu elemen kunci dalam rantai tersebut adalah keberhasilan perlindungan terhadap sumber produksi pangan, yaitu tumbuhan dan hewan,” tegas Sarwo Edhy

Menurutnya, ancaman nyata seperti perubahan iklim, wabah hama, dan degradasi lingkungan telah menekan kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, teknologi prediktif berbasis big data, kecerdasan buatan, serta mekanisasi modern membuka peluang besar dalam merancang sistem pertanian dan peternakan yang lebih resilien. Dalam hal ini, kolaborasi antara NFA, MPTHI, serta stakeholder pangan lainnya menjadi kunci akselerasi transformasi tersebut.

“Perlindungan tumbuhan dan hewan harus menjadi bagian dari sistem pangan nasional yang terintegrasi. Strategi ketahanan pangan tidak cukup hanya menggenjot produksi, tapi harus dibarengi dengan jaminan keberlanjutan sumber dayanya,” ujarnya.

NFA juga menilai bahwa pendekatan berbasis Panca Usaha Tani perlu dimaknai secara menyeluruh, mencakup penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama, hingga sistem irigasi yang efisien. Setiap elemen saling terkait dan mendukung keberhasilan sistem pangan nasional.

Lebih lanjut, peran MPTHI dinilai strategis sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan praktik terbaik pengendalian hama terpadu, advokasi penggunaan pestisida dan obat hewan secara bijak, serta pendampingan kepada petani dan peternak di tingkat lapangan. Kontribusi ini turut memperkuat upaya NFA dalam menstabilkan pasokan pangan domestik melalui pendekatan preventif terhadap gangguan produksi.

Ketua MPTHI, Sutarto Alimoeso, menekankan bahwa perlindungan tumbuhan dan hewan merupakan komponen vital dalam sistem pangan nasional yang masih kurang ditekankan. “Kami melihat perlindungan ini bukan hanya sebagai tindakan teknis, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan bangsa. Keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada bagaimana kita menjaga kesehatan dan keberlangsungan sumber produksi di lapangan,” ujarnya.

Sutarto juga mendorong peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan di tingkat daerah agar sistem pengawasan dan penanganan gangguan produksi dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

NFA juga terus mendorong kerja sama internasional untuk penguatan kapasitas teknis nasional, termasuk lewat kolaborasi dengan FAO dan jaringan ASEAN. Transfer pengetahuan dan teknologi mutakhir menjadi kunci untuk menjawab tantangan pangan global yang semakin kompleks.

Melalui momentum pertemuan MPTHI ini, NFA mendorong lahirnya rumusan konkret untuk penguatan tata kelola perlindungan tumbuhan dan hewan yang lebih adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, dan inklusif. Di tengah target besar mewujudkan swasembada pangan, perlindungan hayati tidak dapat lagi dipisahkan dari arsitektur ketahanan pangan nasional.

“Perlindungan tumbuhan dan hewan bukan hanya urusan sektor pertanian, tapi juga kepentingan nasional dalam menjaga keberlanjutan pangan. Sistem pangan yang resilien hanya bisa dibangun jika aspek produksi dijaga sejak di hulu,” tegas Sarwo Edhy.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa penguatan perlindungan tumbuhan dan hewan merupakan bagian integral dari transformasi sistem pangan nasional yang tengah digencarkan pemerintah. “Kita tidak bisa bicara swasembada pangan tanpa memastikan bahwa sumber produksinya—baik tanaman maupun hewan—terlindungi dengan baik. Badan Pangan Nasional terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar ekosistem pangan dari hulu ke hilir menjadi lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” ujar Arief.

20 Juni 2025 - Semangat Kolektif Capai Swasembada Pangan, NFA: Fondasi Membangun Ketahanan Pangan Nasional



Riau – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan pentingnya sinergi dan gerak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, saat mendampingi kunjungan kerja resek Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Jadirejo, Riau, Jumat (20/6/2025).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI yang senantiasa memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kami, terutama dalam mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan melalui berbagai kebijakan prorakyat," ujar Sarwo Edhy.

Menurutnya, dukungan penuh tidak hanya difokuskan pada komoditas beras, tetapi juga terhadap komoditas strategis lainnya yang menjadi bagian penting dalam ekosistem ketahanan pangan nasional.

"Jadi, Pak Ahmad Yohan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI), kami sampaikan bahwa beras adalah fondasi utama, tetapi kita juga perlu memperkuat jagung, kedelai, dan komoditas lokal lainnya yang menopang konsumsi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Yohan menyampaikan bahwa komitmen negara terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan diperkuat oleh kebijakan Presiden yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, tetapi juga

untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta daya saing Indonesia di tingkat global.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersatu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pangan nasional. Hanya dengan kebersamaan dan kerja nyata, Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan sekaligus memperkuat daya saing di kancah global.”

Di sisi lain, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog sebagai operator utama melaksanakan pengelolaan CBP berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional.

“Kami melaporkan per 18 Juni 2025, stok beras nasional tercatat sebesar 4,15 juta ton, dengan kontribusi dari wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar 21.334 ton. Untuk komoditas jagung, stok nasional mencapai 86.055 ton, di mana Riau-Kepri menyumbang 2 ton. Realisasi pengadaan beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2025 telah mencapai 2,61 juta ton, termasuk 2.215 ton dari Riau-Kepri. Sementara itu, penyerapan jagung di tingkat nasional tercatat sebanyak 50.130 ton,” ujar Sudarsono.

Lebih lanjut, Sarwo menjelaskan bahwa dengan serapan beras dalam negeri yang telah melampaui 80 persen dari target, pemerintah akan menyalurkan beras SPHP secara selektif mulai Juni hingga akhir tahun guna meredam tekanan harga di pasaran. Distribusi juga diperluas melalui jaringan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar masyarakat perdesaan lebih mudah memperoleh akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.

“Jadi, hasil Rakortas bersama Menko Pangan Bpk Zulkifli Hasan, kami akan melakukan intervensi yang difokuskan pada wilayah-wilayah dengan tingkat inflasi dan harga beras tertinggi. Pemerintah telah menyiapkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,32 juta ton untuk periode Juni hingga Desember 2025 guna menjaga stabilitas harga, khususnya di daerah yang mengalami lonjakan signifikan,” jelas Sarwo.

Sebelumnya, Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa pencapaian swasembada pangan harus terus didorong dengan semangat kolektif dan eksekusi nyata di lapangan.

“Untuk swasembada pangan, ini bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi kita semua, dimulai dari swasembada beras. Tentunya, Bapak Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa kemandirian pangan dan kedaulatan pangan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional,” ujar Arief.

“Yang paling penting adalah kolaborasi dan komitmen kita semua. Indonesia bisa, kalau kita kerjakan bersama-sama,” pungkasnya.

23 Juni 2025 - Perkuat Swasembada Pangan, Badan Pangan Nasional dan Dewan Pertahanan Jalin Kolaborasi Strategis



Jakarta — Badan Pangan Nasional/National Food Agency(NFA) menerima audiensi dari Dewan Pertahanan Nasional(DPN) dalam rangka menjajaki kolaborasi strategis guna memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Kunjungan ini menandai sinergi lintas sektor antara otoritas pangan dan pertahanan dalam menghadapi tantangan ketersediaan pangan di tengah dinamika global.

Delegasi DPN dipimpin oleh Deputy Geostrategi Mayjen TNI Ari Yulianto dan Deputy Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, beserta rombongan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa pangan merupakan elemen krusial dalam membangun sistem pertahanan negara yang kokoh dan berkelanjutan. Stabilitas pasokan dan harga pangan dinilai sebagai komponen strategis yang tak terpisahkan dari stabilitas nasional secara keseluruhan.

Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, mengapresiasi inisiatif kerja sama tersebut dan menekankan bahwa ketahanan pangan yang kuat hanya dapat dicapai bila ketersediaannya terjaga secara berkelanjutan dan mencukupi kebutuhan nasional. “Kalau kita bicara swasembada, inti utamanya ada di ketersediaan. Kalau stoknya lebih dari cukup, maka ketahanan pangan otomatis aman,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya upaya diversifikasi pangan sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung swasembada. “Badan Pangan memiliki tugas menjamin stabilisasi pasokan dan harga, tapi kami juga mendorong diversifikasi pangan. Kami sudah menyusun Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Komoditas Lokal,” jelas Sarwo Edhy.

Perpres tersebut mendorong optimalisasi pangan lokal sumber karbohidrat sebagai alternatif pengganti beras. Langkah ini bertujuan untuk memperluas sumber konsumsi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah. “Kami mendorong pemda—provinsi, kabupaten, kota—untuk membina industri pangan lokal, agar sumber karbohidrat alternatif bisa berkembang dan mendukung swasembada nasional,” tambahnya.

Kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional ini diharapkan menjadi titik awal pembentukan ekosistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan berdaulat—baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi.

24 Juni 2025 - Peringati Hari Keamanan Pangan Sedunia 2025, NFA Luncurkan Indeks Keamanan Pangan Segar



BOGOR – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) resmi meluncurkan Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) sebagai alat ukur nasional dalam menilai tingkat keamanan pangan segar. Peluncuran ini menjadi bagian penting dari penguatan sistem pengawasan berbasis sains dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

“Pada momen penting ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa selain memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia, kita juga menyaksikan peluncuran Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS), yang merupakan terobosan strategis untuk memperkuat sistem keamanan pangan nasional,” ujar Sekretaris Utama NFA, Sarwo

Edhy, saat puncak peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia di IPB International Convention Center, Bogor, pada Selasa (24/6/2025).

IKPS disusun oleh NFA sebagai instrumen pemantauan keamanan dan mutu pangan segar yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan ikan. Indeks ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja daerah, tetapi juga ditetapkan sebagai indikator pembangunan di sektor pangan yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, dengan target capaian nasional pada tahun 2025 sebesar 61.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang telah menunjukkan kinerja baik, NFA juga memberikan penghargaan kepada tiga provinsi dengan capaian IKPS terbaik tahun 2024, yaitu peringkat I: Provinsi Jawa Timur, peringkat II: Provinsi Jawa Tengah, dan peringkat III: Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasinya atas raihan Provinsi Jawa Barat yang meraih peringkat ketiga nasional.

“Ini adalah hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari petani hingga pemerintah daerah, dalam memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman,” ujar Jenal.

Selain penghargaan tersebut, NFA juga menyerahkan Sertifikat Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar kepada tujuh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), yakni: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Sementara itu, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Andriko Noto Susanto, menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, NFA terus mendorong penguatan sistem pengawasan pangan segar, termasuk melalui percepatan perizinan dan peningkatan kapasitas daerah.

“Tercatat, jumlah perizinan meningkat dari 5.970 izin pada 2023 menjadi 9.442 pada 2024. Jumlah sampel pangan yang diambil juga naik dari 16.408 menjadi 29.082. Yang membanggakan, tingkat ketidaksesuaian menurun dari 10,29% menjadi 7,48%. Ini menandakan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan standar keamanan pangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh temuan pangan yang tidak memenuhi syarat kini tengah ditindaklanjuti melalui koordinasi pembinaan dan penindakan oleh NFA, dan kini telah memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kompeten.

Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat kontrol di lapangan, NFA juga terus mengembangkan program Pasar Pangan Segar Aman (PAS Aman), memperluas laboratorium keliling di 15 provinsi, dan mendorong adopsi substansi pengawasan pangan ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), NFA turut mendukung sekolah-sekolah penerima manfaat mengenai pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta melibatkan sarjana penggerak untuk mendampingi proses di lapangan.

Sebelumnya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam kunjungan ke Dapur MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Megamendung, Bogor, Selasa (24/6/2025), menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan menjadi prioritas nasional yang harus dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif.

“Keamanan pangan itu tidak bisa ditawar. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat. Maka, sistem pengawasan pangan segar harus berjalan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi,” tegas Arief,

Arief menambahkan bahwa peluncuran IKPS merupakan langkah konkret untuk mengukur dan mendorong kinerja daerah secara objektif dan terukur.

“Kita ingin semua daerah memiliki standar yang sama dalam menjamin keamanan pangan. IKPS akan menjadi panduan dan pemicu agar daerah semakin serius membangun sistem pengawasannya,” ujar Arief.

27 Juni 2025 – NFA Dukung Penuh Festival Bawang Merah Brebes, Perkuat Posisi Strategis Komoditas Nasional



Brebes - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memperkuat peranannya dalam menjaga stabilitas pangan pokok strategis nasional, termasuk bawang merah yang menjadi salah satu komoditas unggulan. Dukungan terhadap

berbagai inisiatif daerah dalam memperkuat ekosistem pertanian bawang merah menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan nasional yang terintegrasi.

Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut tampak dalam kehadiran NFA pada Festival Bawang Merah Brebes 2025, sebuah ajang yang tidak hanya merayakan panen petani, tetapi juga mendorong promosi dan penguatan agribisnis komoditas nasional.

Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut dan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan produksi bawang merah.

“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan festival ini sebagai sarana mempromosikan bawang merah Brebes. Komoditas ini merupakan salah satu pangan pokok strategis yang menjadi perhatian Badan Pangan Nasional dalam memastikan ketersediaannya secara nasional,” ujar Sarwo saat menghadiri puncak acara Festival Bawang Merah, Jumat (27/6), di Brebes, Jawa Tengah.

Ia menambahkan bahwa NFA terus melakukan pemetaan antara daerah sentra produksi (surplus) dan daerah konsumsi (minus) untuk memastikan distribusi berjalan merata dan harga tetap stabil. “Kami berkoordinasi secara rutin dengan Ketua Asosiasi Bawang Merah melalui Direktorat yang membidangi di Badan Pangan Nasional untuk monitoring dan evaluasi distribusi. Harapannya produksi tinggi, distribusi lancar, dan harga terkendali,” tegasnya.

Sarwo juga mengimbau para petani agar tetap menjaga kualitas produksi melalui penerapan budidaya yang baik, termasuk penggunaan benih unggul, pengolahan lahan, kecukupan air, dan pemupukan yang seimbang.

“Untuk menjaga ketersediaan sepanjang tahun, NFA juga telah menyiapkan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) bagi produk seperti bawang merah,” tambahnya. Salah satu unit cold storage dengan kapasitas 16 ton telah dimanfaatkan sejak April 2023 oleh Asosiasi Petani Bawang Merah di Desa Wanasari, Brebes.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa Brebes memegang posisi strategis dalam rantai pasok bawang merah nasional.

“Brebes adalah barometer produksi bawang merah nasional. 20 persen dari total produksi bawang merah. Kita harus bangga karena dari daerah ini, kita tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menembus pasar ekspor. Ini menunjukkan petani kita tangguh dan mampu bersaing,” ujar Arief.

Menurutnya, penguatan komoditas strategis seperti bawang merah memerlukan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir. “Kami terus mendorong penguatan ekosistem mulai dari penyediaan benih dan sarana produksi, akses pembiayaan,

hingga fasilitas pascapanen. Kolaborasi pusat dan daerah jadi kunci untuk ketahanan pangan berkelanjutan,” tandasnya.

Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Dian Alex Chandra menekankan bahwa petani merupakan subjek utama pembangunan pertanian.

“Setiap siung bawang merah mengandung tetes keringat petani. Kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, agar hasil panen petani bisa terserap optimal, dan harga tetap terjaga,” katanya.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dalam sambutannya menyampaikan bahwa produksi bawang merah di wilayahnya mencapai 300 ribu ton per tahun, dengan luas tanam sekitar 30 ribu hektar dan produktivitas rata-rata 12,5 ton per hektar.

“Hari ini kita ekspor perdana 11.800 ton bawang merah ke Thailand, Singapura, dan Vietnam. Ini menjadi bukti bahwa dari lahan-lahan di Brebes, hasil panen petani kita mampu menjangkau pasar Asia,” ujarnya.

Festival Bawang Merah Brebes yang juga menghadirkan bazar UMKM, Gerakan Pangan Murah, kontes bawang merah, hingga talkshow petani muda, menjadi wujud nyata bahwa kolaborasi antarsektor merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan nasional dari daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komisi II DPR RI Shintya Sandra Kusuma, Direktur SPHP NFA Maino Dwi Hartono, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Idil Fitri, Kepala Perwakilan BI Tegal dan segenap Forkopimda Kab Brebes.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Sekretariat Utama pada periode bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama adalah Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 2,690,897,892,000,- dari total pagu Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 2,690,897,892,000,- yang terdiri dari 6 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 15 Rincian Output (RO).
2. Realisasi keuangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Juni 2025 mencapai Rp. 11,312,546,468 (99,50%) dari target sebesar 7.795.794.703 (10,11%)

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Utama adalah masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa MAK, bahkan ada yang masih 0 realisasinya pada awal tahun dikarenakan anggaran masih belum bisa digunakan pada saat awal tahun.

4.3 Rekomendasi

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

1. Penyelesaian dokumen pendukung sebagai syarat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi ABT Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
2. Penyiapan SDM yang akan menangani pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk mendorong realisasi keuangan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 7 Tanggal 18 Juni 2025

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 125.01.1.690590/2025		 036 1876 6014-0100-8700	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025				Revisi ke 07 Tanggal : 18 Juni 2025	
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL 2. Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA 4. Kode/Nama Sakler : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL Sebesar : Rp. 2.801.268.025.000 (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS SATU MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)					
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 04 EKONOMI 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Terlampir		Jumlah Uang	
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	2.801.268.025.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui		(139) Rp.	6. SBSN PBS	Rp.	0
1. KOPIN JAKARTA V					
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakler dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terbuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					
				Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN	
				ttd LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002	

Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan Juni 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT
Data s/d tanggal 30 Juni 2025

URAIAN	PAGU REVISI	LOCK PAGU	REALISASI PERIODE INI	REALISASI SP2D	%	REALISASI AKRUAL	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	2,690,897,892,000	0	725,476,243,114	804,724,639,944	29.91%	2,350,835,673,883	87.36%	1,886,173,252,066
W								
A								
Program Dukungan Manajemen	112,459,882,000	0	11,312,546,468	45,647,821,204	40.59%	52,645,026,576	46.81%	66,812,060,796
WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112,459,882,000	0	11,312,546,468	45,647,821,204	40.59%	52,645,026,576	46.81%	66,812,060,796
AEC								
101 Kerjasama	824,972,000	0	210,813,284	262,840,782	31.86%	262,840,782	31.86%	562,131,218
AEC.001								
101 Kerjasama Bidang Pangan	824,972,000	0	210,813,284	262,840,782	31.86%	262,840,782	31.86%	562,131,218
101.0A Kerjasama di Bidang Pangan	824,972,000	0	210,813,284	262,840,782	31.86%	262,840,782	31.86%	562,131,218
EBA								
101 Layanan Dukungan Manajemen Internal	94,310,610,000	0	10,226,195,487	40,255,075,900	42.68%	45,395,623,903	48.13%	54,055,534,100
EBA.956								
101 Layanan BMN	325,011,000	0	73,003,335	195,512,535	60.16%	195,512,535	60.16%	129,498,465
101.0A Layanan BMN dan Pengadaan	325,011,000	0	73,003,335	195,512,535	60.16%	195,512,535	60.16%	129,498,465
101.0A.0A Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	153,140,000	0	31,183,000	94,970,200	62.02%	94,970,200	62.02%	58,169,800
101.0B Layanan Pengelolaan BMN	171,871,000	0	41,820,335	100,542,335	58.50%	100,542,335	58.50%	71,328,665
EBA.957								
101 Layanan Hukum	686,492,000	0	12,978,500	114,536,531	16.68%	177,941,425	25.92%	571,955,469
101.0A Layanan Hukum	686,492,000	0	12,978,500	114,536,531	16.68%	177,941,425	25.92%	571,955,469
101.0B Layanan Advokasi Hukum	351,350,000	0	12,978,500	77,682,125	22.11%	129,000,325	36.72%	273,667,875
101.0C Layanan Penguatan JDIH, IRH dan IKK	166,542,000	0	0	36,854,406	22.13%	48,941,100	29.39%	123,687,594
101.0D Layanan Penguatan JDIH, IRH dan IKK	168,600,000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	168,600,000
EBA.958								
101 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,373,720,000	0	178,560,223	736,579,211	31.03%	822,679,218	34.66%	1,637,140,789
101.0A Layanan Hubungan Masyarakat	2,373,720,000	0	178,560,223	736,579,211	31.03%	822,679,218	34.66%	1,637,140,789
101.0A.0A Layanan Humas dan Informasi Publik	2,373,720,000	0	178,560,223	736,579,211	31.03%	822,679,218	34.66%	1,637,140,789
EBA.959								
101 Layanan Protokol	580,600,000	0	64,606,671	283,827,401	48.89%	284,877,401	49.07%	296,772,599
101.0A Layanan Protokol	580,600,000	0	64,606,671	283,827,401	48.89%	284,877,401	49.07%	296,772,599
101.0A.0A Layanan Keprotokolaran	580,600,000	0	64,606,671	283,827,401	48.89%	284,877,401	49.07%	296,772,599
EBA.960								
101 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000	0	221,116,500	207,778,260	19.41%	322,161,260	30.10%	862,482,740
101.0A Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000	0	221,116,500	207,778,260	19.41%	322,161,260	30.10%	862,482,740
101.0A.0A Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Kelola	458,791,000	0	2,370,000	71,183,070	15.52%	176,611,070	38.49%	387,607,930
101.0B Layanan Reformasi Birokrasi	188,150,000	0	6,365,000	35,865,000	19.06%	44,820,000	23.82%	152,285,000
101.0C Pengembangan Jabatan Fungsional	423,320,000	0	13,381,500	100,730,190	23.80%	100,730,190	23.80%	322,589,810
EBA.962								
101 Layanan Umum	7,844,720,000	0	714,513,512	3,344,607,817	42.64%	4,885,158,331	62.27%	4,500,112,183
101.0A Layanan Umum	7,844,720,000	0	714,513,512	3,344,607,817	42.64%	4,885,158,331	62.27%	4,500,112,183
101.0A.0A Layanan Rumah Tangga Pimpinan	3,778,806,000	0	279,146,859	1,969,918,788	52.13%	2,101,905,015	55.62%	1,808,887,212
101.0B Layanan Dukungan Kesekretariatan	3,127,701,000	0	341,028,769	1,175,246,045	37.58%	2,583,810,332	82.61%	1,952,454,955
101.0C Layanan Tata Usaha Biro	330,560,000	0	40,298,220	44,458,720	13.45%	44,458,720	13.45%	286,101,280
101.0D Layanan Tata Usaha Pimpinan	298,413,000	0	42,612,164	119,203,764	39.95%	119,203,764	39.95%	179,209,236
101.0E Layanan Persuratan dan Kearsipan	309,240,000	0	11,427,500	35,780,500	11.77%	35,780,500	11.77%	273,459,500
EBA.994								
101 Layanan Perkantoran	81,429,806,000	0	9,160,416,716	35,372,234,145	43.44%	38,707,293,733	47.53%	46,057,571,855
001 Gaji dan Tunjangan	64,100,476,000	0	8,212,090,496	29,180,755,171	45.52%	30,755,085,653	47.98%	34,919,720,829
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	64,100,476,000	0	8,212,090,496	29,180,755,171	45.52%	30,755,085,653	47.98%	34,919,720,829
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	17,329,330,000	0	948,326,220	6,191,478,974	35.73%	7,952,208,080	45.89%	11,137,851,020
002.0A Administrasi Kegiatan	1,224,388,000	0	47,482,000	335,556,250	27.41%	383,308,250	31.28%	888,831,750
002.0B Terpeliharanya Kendaraan	2,248,257,000	0	51,353,272	573,620,950	25.51%	573,620,950	25.51%	1,674,636,050
002.0C Terbayarnya Layanan Telepon dan Listrik	66,000,000	0	0	35,000,000	53.03%	35,000,000	53.03%	31,000,000
002.0D Tenaga Teknis Lainnya	6,648,540,000	0	537,352,000	3,224,112,000	48.49%	4,561,064,000	68.60%	3,424,428,000
002.0E Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,637,395,000	0	312,138,948	2,017,929,774	35.80%	2,394,224,880	42.47%	3,619,465,226
002.0F Peralantikan Jabatan	64,750,000	0	0	5,260,000	8.12%	5,260,000	8.12%	59,490,000
002.0G Dana Operasional Pimpinan Kementerian/Lembaga	1,440,000,000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	1,440,000,000
EBB								
101 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,314,054,000	0	51,750,000	860,657,060	65.50%	860,657,060	65.50%	453,396,940
EBB.951								
101 Layanan Sarana Internal	1,314,054,000	0	51,750,000	860,657,060	65.50%	860,657,060	65.50%	453,396,940
101.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,314,054,000	0	51,750,000	860,657,060	65.50%	860,657,060	65.50%	453,396,940
EBC								
101 Layanan Manajemen SDM Internal	1,887,686,000	0	89,202,520	400,353,687	21.21%	678,583,687	35.95%	1,487,332,313
EBC.954								
101 Layanan Manajemen SDM	1,887,686,000	0	89,202,520	400,353,687	21.21%	678,583,687	35.95%	1,487,332,313
101.0A Layanan Manajemen SDM Internal	1,887,686,000	0	89,202,520	400,353,687	21.21%	678,583,687	35.95%	1,487,332,313
101.0A.0A Layanan Manajemen SDM	494,862,000	0	64,304,100	213,073,267	43.06%	218,553,267	44.16%	281,788,733
101.0B Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1,125,074,000	0	0	100,732,000	8.95%	280,732,000	24.95%	1,024,342,000
101.0C Layanan Rencanansi dan Perencanaan Kegiatan Organisasi, Sumbu dan Misi	267,750,000	0	24,898,420	86,548,420	32.32%	179,298,420	66.96%	181,201,580
EBD								
101 Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,397,226,000	0	339,808,736	2,501,513,927	24.06%	2,752,263,927	26.47%	7,895,712,073
EBD.952								
101 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000	0	141,695,104	564,315,073	10.59%	670,315,073	12.58%	4,765,366,927
101.0A Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000	0	141,695,104	564,315,073	10.59%	670,315,073	12.58%	4,765,366,927
101.0A.0A Layanan Perencanaan dan Evaluasi	771,904,000	0	33,397,123	153,821,185	19.93%	153,821,185	19.93%	618,082,815
101.0A.0A.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	0	33,397,123	153,821,185	19.93%	153,821,185	19.93%	618,082,815
EBD.955								
101 Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000	0	43,946,544	411,677,444	37.63%	411,677,444	37.63%	682,368,556
101.0A Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000	0	43,946,544	411,677,444	37.63%	411,677,444	37.63%	682,368,556
101.0A.0A Layanan Perbendaharaan	378,141,000	0	121,288,264	131,413,164	34.75%	131,413,164	34.75%	246,727,836
101.0B Layanan Akuntansi dan Verifikasi	383,850,000	0	16,000,000	172,412,000	44.92%	172,412,000	44.92%	211,438,000
101.0C Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	182,734,000	0	0	32,220,000	17.63%	32,220,000	17.63%	150,514,000
101.0D Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	149,321,000	0	6,658,280	75,632,280	50.65%	75,632,280	50.65%	73,688,720
EBD.965								
101 Layanan Audit Internal	3,201,594,000	0	120,769,965	1,371,700,225	42.84%	1,516,450,225	47.37%	1,829,893,775
101.0A Layanan Audit Internal	3,201,594,000	0	120,769,965	1,371,700,225	42.84%	1,516,450,225	47.37%	1,829,893,775
101.0A.0A Layanan Audit Internal	383,094,000	0	50,837,689	118,295,239	30.88%	263,045,239	68.66%	264,798,761
101.0B Audit pada Satek lingkup Badan Pangan Nasional	560,000,000	0	0	220,767,715	39.42%	220,767,715	39.42%	339,232,285
101.0C Tindak lanjut hasil pengawasan dan kegiatan satek pada lingkup Badan Pangan Nasional	224,000,000	0	0	158,219,484	70.63%	158,219,484	70.63%	65,780,516
101.0D Tindak lanjut hasil pengawasan Internal/ External	152,000,000	0	0	10,545,100	6.94%	10,545,100	6.94%	141,454,900
101.0E Pemantauan atas Penerapan SIP/ paca unit kerja lingkup badan	55,667,516	0	59,984,516	59,984,516	64.36%	59,984,516	64.36%	33,215,484
101.0F Pemantauan pelaksanaan SIP/ Yanditas/ APB/ manid manid maturitas SPDI/ Danlaminan Kualitas Mutu SPDI	120,000,000	0	14,264,760	81,591,860	67.99%	81,591,860	67.99%	38,408,140
101.0G Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis/Prioritas	240,000,000	0	0	239,283,066	99.70%	239,283,066	99.70%	716,934
101.0H Penyusunan NSPK	59,300,000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	59,300,000
101.0I Reviu Bantuan Pangan	1,370,000,000	0	0	483,013,245	35.26%	483,013,245	35.26%	886,986,755
PAD								
101 Peraturan Presiden	270,775,000	0	23,527,500	39,957,500	14.76%	39,957,500	14.76%	230,817,500
PAD.001								
101 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	0	23,527,500					